

PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI SMK DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN KAWASAN EKONOMI INDUSTRI

PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI SMK DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN KAWASAN EKONOMI INDUSTRI

Buku ini berisikan laporan akhir dari dua kerja besar. Pertama adalah yang memotret secara menyeluruh perkembangan dan pertumbuhan kawasan industri dalam kaitan dengan program kemitraan (partnership) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan KEK dan KEI, termasuk di dalamnya upaya-upaya yang mesti disiapkan oleh pihak SMK dalam meningkatkan kompetensi. Riset ini dilakukan di dua wilayah (lokasi penelitian) yang merupakan representasi dari KEK dan KEI, yaitu di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Sebagai kerja besar kedua, riset tersebut juga diikuti oleh focus group discussion (FGD) untuk membuat Pedoman Peningkatan Kompetensi SMK di KEK dan KEI. Sebagaimana disebutkan dalam buku ini, FGD ini dilaksanakan dengan mengundang peserta dengan beragam latarbelakang, dari mulai pihak sekolah (SMK), pengguna lulusan, perwakilan dari pemerintah daerah, ahli pendidikan, termasuk perwakilan dari Direktorat Pembinaan SMK.

**SUARA
MUHAMMADIYAH**
Melayari Ilmu dan Amal



Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta

ISBN : 978-602-6268-79-2



TIM PENULIS:

DR. RETNOWATI WD. TUTI, M.SI.
DR. ENDANG SULASTRI, M.SI.
DR. MA'MUN MUROD AL-BARBASY
DR. USNI HASANUDDIN, M.SI.
DR. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.SI.
DR. SA'DIYAH EL-ADAWIYAH
DJONI GUNANTO, M.SI.

PENYUNTING:

DR. MA'MUN MUROD AL-BARBASY

SUARA MUHAMMADIYAH

PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI SMK DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN KAWASAN EKONOMI INDUSTRI

TIM PENULIS:

DR. RETNOWATI WD. TUTI, M.SI.
DR. ENDANG SULASTRI, M.SI.
DR. MA'MUN MUROD AL-BARBASY
DR. USNI HASANUDDIN, M.SI.
DR. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.SI.
DR. SA'DIYAH EL-ADAWIYAH
DJONI GUNANTO, M.SI.

PENYUNTING:

DR. MA'MUN MUROD AL-BARBASY

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 ayat 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengarsenamen, atau pentransformasian Ciptaan; (e) pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukkan Ciptaan; (g) pengumuman Ciptaan; (h) komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau HakTerkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Soeharto, Bohar. 1991. *Perencanaan Sosial Kasus Pendekatan*. Bandung: Armico
- Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Rosdakarya. Cet IV
- Usman, Husaini. 2006. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Internet

- <https://pangkalpinangkota.bps.go.id/pressrelease/2018/11/06/227/menurut-persepsi-konsumen--kondisi-ekonomi-kondisi-kepulauan-bangka-belitung-triwulan-iii-2018-menurun.html>
- <http://www.pangkalpinangkota.go.id/pariwisata/>

PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI SMK DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN KAWASAN EKONOMI INDUSTRI

TIM PENULIS:

DR. RETNOWATI WD. TUTI, M.SI.
DR. ENDANG SULASTRI, M.SI.
DR. MA'MUN MUROD AL-BARBASY
DR. USNI HASANUDDIN, M.SI.
DR. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.SI.
DR. SA'DIYAH EL-ADAWIYAH
DJONI GUNANTO, M.SI.

PENYUNTING:

DR. MA'MUN MUROD AL-BARBASY

**PEDOMAN PENINGKATAN
KOMPETENSI SMK DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS DAN KAWASAN
EKONOMI INDUSTRI**

Penulis • **Dr. Retnowati WD. Tuti, M.Si.; Dr. Endang Sulastri, M.Si.;
Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy; Dr. Usni Hasanuddin, M.Si.;
Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si.; Dr. Sa'diyah El-Adawiyah
Djoni Gunanto, M.Si.**

Penyunting • **Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy**

Perancang sampul • **Budi Puspa Wijaya**

Perancang isi • **padangatine@gmail.com**

Diterbitkan pertama kali atas seizin penulis oleh **Penerbit Suara Muhammadiyah** bekerjasama dengan **Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia** dan **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Alamat • **Grha Suara Muhammadiyah, Jl. KHA. Dahlan No. 107,
Yogyakarta 55173**

Telp. • **(0274) 376 955, Fax. 411306**

SMS/WA • **0822 1166 1915**

Facebook • **Penerbit Suara Muhammadiyah**

Email • **Penerbitsm@gmail.com (Redaksi)**

Adm2015penerbitansm@gmail.com (Admin)

Homepage • **www.suaramuhammadiyah.id**

Cetakan I, Desember 2020

viii + 42 hlm., 15 x 23 cm

Hak Cipta © Penerbit Suara Muhammadiyah, 2020

Hak Cipta dilindungi undang-undang

ISBN: 978-602-6268-79-2

Daftar Pustaka

Buku

- Anshori, Nunung Isa. 1992. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Bumi Ankasa
- Cammings, Williams. *Studi Pendidikan dan Tenaga Kerja pada Beberapa Industri Besar di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian BP3K
- Enoch, Jusuf. 1992. *Dasar-dasar Perencanaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Sayuti. 1987. *Changing Manpower Requirements in The Face of Non-Oil Growth*
- Indar, Djumberansyah. 1995. *Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya*. Surabaya: Karya Aditama
- Labor Force Growth and Fast Tehnological Change. Jakarta: Bappenas
- Limongan, Andreas. *Masalah Pengangguran di Indonesia*. Diakses Tanggal 07 Januari 2008
- Sa'ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun, 2006. *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet II
- Sindhunata (ed), 2001. *Pendidikan Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Kanisius
- Sindhunata (ed). 2000. *Menggegas Paradigma Baru Pendidikan: Demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius

Pengantar Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud

Alhamdulillah, meskipun sedikit terlambat, penulisan laporan akhir riset Peningkatan Kompetensi SMK di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Ekonomi Industri (KEI) berhasil diselesaikan. Laporan akhir ini sebenarnya merupakan penggabungan dari dua kerja besar. Pertama, memotret secara menyeluruh perkembangan dan pertumbuhan kawasan industri dalam kaitan dengan program kemitraan (*partnership*) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan KEK dan KEI, termasuk di dalamnya upaya-upaya yang mesti disiapkan oleh pihak SMK dalam meningkatkan kompetensi.

Sebagai upaya memotret secara menyeluruh, maka riset ini mengambil dua wilayah (lokasi penelitian) yang merupakan representasi dari KEK dan KEI, yaitu di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Riset ini menghasilkan beberapa temuan yang mendesak untuk ditindaklanjuti lewat pembuatan kebijakan-kebijakan yang setidaknya dapat memperkuat *positioning* SMK, terutama dalam upaya menjalin kemitraan dengan KEK dan KEI, sehingga ke

depannya diharapkan akan menjadikan lulusan SMK lebih mudah untuk bisa diterima di dunia kerja.

Hasil dari riset lapangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan kerja besar kedua, yaitu dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membuat Pedoman Peningkatan Kompetensi SMK di KEK dan KEI. Sebagaimana disebutkan dalam laporan ini, FGD ini dilaksanakan dengan mengundang peserta dengan beragam latarbelakang, dari mulai pihak sekolah (SMK), pengguna lulusan, perwakilan dari pemerintah daerah, ahli pendidikan, termasuk perwakilan dari Direktorat Pembinaan SMK.

Kalau menilik laporan yang dibuat Tim Peneliti, penting rasanya untuk memperbanyak dan dibuat tersendiri dalam bentuk "Buku Pedoman Peningkatan Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Ekonomi Industri", yang kemudian dibagikan kepada pihak-pihak terkait, terutama pihak sekolah, para pengguna lulusan, dan pembuat kebijakan di bidang pariwisata.

Akhirnya, dengan selesainya pemuatan laporan akhir riset ini, saya merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak. Yang pertama, tentu ucapan terima kasih kepada Tim Peneliti yang diketuai oleh Dr. Retnowati WD. Tuti beserta anggota tim lainnya. Kemudian terima kasih juga kepada pihak sekolah, para pengguna lulusan, dan pihak lainnya yang mendukung pelaksanaan riset ini. Semoga hasil riset ini bermanfaat. Sekian.

Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud

Dr. Ir. M. Bakrun, MM.

1.8.4. Sinergi dengan Asosiasi Profesi

1. Asosiasi profesi, sesuai dengan tugas, wewenang, peran dan fungsinya, perlu menata diri yang mengarah pada eksistensinya sebagai Asosiasi Profesi Dosen dan Guru Vokasi, bersama-sama dengan SMK, pemerintah dan dunia usaha/dunia industri bersinergi melakukan peran dan fungsinya sesuai tugas dan Standarisasi Program Pendidikan Calon Guru dan Program Pendidikan Profesi Guru SMK,
2. Uji Kompetensi Guru dan calon Guru SMK
3. Pembinaan Guru Vokasi Profesional SMK
4. Menghasilkan pemikiran, konsep, model, program yang didasarkan pada penelitian di berbagai aspek pendidikan vokasi baik pada program pendidikan profesi guru, pembinaan guru dan proses pendidikan di SMK.
5. Merangsang munculnya keunggulan kompetitif yang dinamis melalui pendidikan dan pelatihan yang memiliki akar yang kuat dan landasan yang benar-benar visioner dan missioner.

Wewenangnya, yaitu, melaksanakan kerjasama kolaborasi yang sinergi ini yakni antara SMK, pemerintah pusat, di mana empat kementerian terkait secara teknis, Kemendikbud; Kemenristekdikti; Kemenperin dan Kemennaker, BNSP dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan satuan kerja perangkat daerah yang terkait), asosiasi profesi dan dunia usaha/dunia industri harus berujung pada dihasilkannya "Lulusan SMK yang Terstandar" sebagai manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. •

pelaksanaan pendidikan, dan peningkatan efektivitas external (relevansi) sekolah menengah kejuruan. Pada perkembangan prosesnya wakil dunia kerja akan menjadi unsur dalam “Badan Penasehat Sekolah” (Advisory Board).

Untuk mencapai hubungan kerjasama yang erat antara sekolah dengan dunia kerja diperlukan waktu dan tenaga khusus yang menangani hal tersebut. Keberhasilan sekolah dalam membina kerjasama yang baik dengan dunia kerja tidak diperoleh dari satu atau dua kali pendekatan saja, melainkan diperlukan pendekatan yang berulang kali.

Kegiatan validasi kurikulum, praktek kerja industri (prakerin) bagi siswa, program Bimbingan Karier, dan Unit Produksi dapat pula merupakan kegiatan yang akan membuka jalan menuju kerjasama yang lebih luas antara sekolah dan dunia kerja. Penempatan siswa SMK “on the job training di dunia usaha/dunia industri”, secara konseptual SMK dan dunia usaha melakukan perencanaan bersama, dalam arti penempatan siswa SMK memenuhi kriteria akademik dan sinkron dengan “job” yang ada pada dunia usaha/dunia industri. Kegiatan ini akhirnya bermuara pada siswa dapat bekerja pada lini produksi (production line) sehingga segala peraturan yang diberlakukan pada dunia usaha/dunia industri terhadap karyawan juga diberlakukan sama kepada siswa yang melakukan praktik kerja industri (prakerin). Kalau konsep kerjasama ini dapat dilaksanakan secara sistematis dan sistemik, akan terjadi kemitraan sinergik antara dunia usaha/dunia industri mendapatkan tenaga kerja murah”, di sisi lain siswa SMK akan mendapatkan pengalaman kerja langsung tidak lagi bersifat simulasi.

Dalam membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri mesti direalisasikan dalam sebuah Memorandum of Understanding (MOU) dan Standart Operating Procedure (SOP). Prosedur kerjasama untuk kegiatan praktek kerja industri (Prakerin) dimulai pada awal tahun dengan tahap perencanaan dan persiapan, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan Prakerin, kemudian tahap evaluasi Prakerin.

Daftar Isi

PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN SMK KEMDIKBUD— v DAFTAR ISI— vii

- 1.1. **Pendahuluan — 1**
- 1.2. **Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan— 3**
 - 1.2.1. Muatan Kurikulum Mengandung Unsur Moral dalam Teori dan Praktek — 3
 - 1.2.2. Kesesuaian Kurikulum dengan Regulasi dan Kebutuhan DUDI — 8
- 1.3. **Link and Match Sekolah Menengah Kejuruan— 12**
 - 1.3.1. Adaptasi Konsep Pembelajaran SMK dengan DUDI — 12
 - 1.3.2. Konsep Teaching Factory Memberikan Ruang dan Peluang bagi Siswa untuk Lebih Berkreasi— 16
- 1.4. **Metode Pembelajaran— 17**
 - 1.4.1. Pemahaman TIK Pembelajaran terdiri dari proses belajar mengajar— 20
 - 1.4.2. Pendidikan kejuruan — 22

- 1.5. **Kriteria Tempat Magang — 23**
 - 1.5.1. Program Pemagangan— 24
 - 1.5.2. Sarana dan Prasarana Pemagangan— 24
 - 1.5.3. Pembimbing Pemagangan— 25
- 1.6. **Praktek Kerja— 25**
 - 1.6.1. Data primer— 27
 - 1.6.2. Data Sekunder— 27
- 1.7. **Pemagangan Pra dan Pasca Kelulusan — 30**
 - 1.7.1. Pemagangan Pra Kelulusan— 30
 - 1.7.2. Program Pemagangan Pasca Kelulusan— 34
- 1.8. **Sinergi Sekolah, Pemerintah, Dunia Usaha, dan Asosiasi Profesi— 34**
 - 1.8.1. Sinergi Dengan Pemerintah— 34
 - 1.8.2. Sinergi dengan DUDI— 36
 - 1.8.3. Pemilihan calon siswa— 37
 - 1.8.4. Sinergi dengan Asosiasi Profesi— 39

DAFTAR PUSTAKA — 41

pihak industri telah mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki para lulusan dari sekolah yang telah menjalin kerjasama dengan industri yang bersangkutan.

Kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah. Peranan kerjasama dengan dunia industri akan menjadi penting artinya karena kerjasama tersebut akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sekolah menengah kejuruan (SMK).

Hubungan kerjasama antara sekolah dan dunia kerja dapat meliputi:

1. Output sekolah menengah kejuruan, yakni penempatan/ penyerapan lulusan kedalam lapangan kerja secara semestinya.
2. Proses pelaksanaan proses belajar mengajar dan evaluasi performasi: pada gilirannya dapat mengarah pada sertifikasi keahlian.
3. Input Instrumental, yang meliputi.
 - a. Pemanfaatan sumber-sumber belajar, misalnya sarana peralatan praktek, bengkel/shop, lahan pertanian (field laboratory), dapur produksi, dsb.
 - b. Penyandangan bersama dana pendidikan
 - c. "Saling-asah" personil (antara guru/sekolah dan teknisi/ industri)
 - d. Keterlibatan dalam semua aspek pelaksanaan Prakerin, seperti perencanaan dan evaluasi Prakerin, hal ini agar pelaksanaan Prakerin SMK berhasil. Dengan turut terlibat dalam perencanaan dan evaluasi Prakerin DUDI dapat menyeleksi lebih awal calon tenaga kerja yang mereka butuhkan dan memberikan masukan secara langsung tentang pelaksanaan Prakerin.
 - e. Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik (guru SMK)
4. Input Siswa.

1.8.3 **Pemilihan calon siswa**

Kesemuanya pada dasarnya adalah upaya untuk pemutakhiran kemahiran (guru maupun siswa), transformasi teknologi, efisiensi

6. Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.
7. Optimalisasi utilitas SMK di luar jam belajar mengajar untuk pemberdayaan masyarakat sekitar SMK:
 - a. Pembangunan karakteristik pendidikan kejuruan model pasar (the market model. Model pasar yakni di mana pemerintah tidak terlibat dalam proses kualifikasi kejuruan, tapi diberikan kepada dunia usaha atau dunia industri.
 - b. Koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud melalui Dirjen Pembinaan SMK dan pemerintah Provinsi serta SKPD yang sesuai dengan jurusan yang ada di SMK, dalam penyaluran siswa magang maupun praktek kerja industri (Prakerin).
 - c. Pola Koordinasi intensif antara beberapa kementerian terkait.
 - d. Sinkronisasi Kurikulum.
 - e. Penataan bidang/program keahlian sebagai upaya penyesuaian bidang dan program keahlian yang ada di seluruh SMK agar sesuai dengan potensi wilayah atau kebutuhan pasar kerja.
 - f. Sistem diklat yang permeable dan fleksibel menempatkan SMK sebagai bagian integral dari sistem diklat di daerah dan kebijakan penataan kurikulum disesuaikan potensi wilayah/daerah.

1.8.2. Sinergi dengan DUDI

Kerjasama antara SMK dan dunia usaha atau dunia industri sangat diperlukan terkait dengan perkembangan teknologi yang terjadi di industri yang sangat pesat sehingga sekolah akan jauh tertinggal jika tidak menjalin kerjasama dengan industri, sebab pihak sekolah tidak mungkin menyediakan semua peralatan yang sesuai dengan kebutuhan industri dalam proses pembelajaran di sekolah. Di samping itu, kerjasama dengan industri juga akan membantu pihak sekolah dalam menyalurkan lulusannya sebab

1.1. Pendahuluan

Dunia pendidikan memiliki peran sentral dalam perkembangan kemajuan negara Indonesia. Seiring dengan berbagai perkembangan jaman, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan. Hal ini dapat diukur dari kurang atau rendahnya kompetensi lulusan berbagai keahlian di sekolah, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia kerja. Hasil penelitian yang kami lakukan, menunjukkan perkembangan dunia pendidikan selalu lebih lambat dari perkembangan dunia industri. Kondisi tersebut, dikhawatirkan lulusan SMK mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dengan lapangan kerja dan industri.

Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan merupakan suatu ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah (*in-school succes standarts*) dan kualitas menurut ukuran masyarakat (*out-of school succes standarts*). Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikulum yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja. Sedangkan kriteria kedua meliputi keberhasilan peserta didik yang tertampilkan pada kemampuan untuk kerja sesuai dengan standart hasil belajar nasional ataupun internasional setelah mereka berada di lapangan kerja sebenarnya.

Upaya untuk mencapai kualitas pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industry (DUDI), perlu dibarengi dengan kurikulum yang rancang dan dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan *stakeholders*. Kurikulum

pendidikan kejuruan secara spesifik memiliki karakter yang mengarah pada pembentukan kecakapan peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan tertentu. Kecakapan tersebut telah diakomodasi dalam kurikulum SMK yang meliputi kelompok mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif.

Sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia industri serta *stakeholders* di masyarakat sangat dibutuhkan. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan di sekolah perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan harapan pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari sisi pengetahuan maupun penyelesaian masalah kontekstual yang dihadapi sehari-hari.

Selama ini pembelajaran belum bisa memenuhi semua tuntutan masyarakat, terutama bidang keterampilan hidup sesuai kondisi lokal hidup peserta didik. Materi pembelajaran seringkali tidak sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya, setelah lulus sekolah peserta didik tidak bisa langsung menerapkan teori yang didapatkan dari sekolah.

Fenomena yang terjadi, antara dunia pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak sesuai dan terjadi kesenjangan yang cukup signifikan. Kebutuhan masyarakat belum bisa diwujudkan sepenuhnya oleh lembaga pendidikan. Di antara indikator masalah ini adalah lulusan lembaga pendidikan belum siap pakai karena hanya menguasai teori, sementara miskin keterampilan. Dunia industri pun akhirnya meninggalkan sekolah karena tidak ada *linkage*. Selain itu juga disebabkan materi pembelajaran tidak sesuai potensi daerah di mana peserta didik bertempat tinggal. Materi pembelajaran dan konteks kehidupan peserta didik tidak padu, sehingga tidak terjadi transfer pembelajaran dalam kehidupan peserta tidak terjadi. Mengacu pada indikasi tersebut, maka peluang kerja bagi lulusan SMK pada dasarnya belum begitu menggembirakan.

Sesuai dengan tujuan pendidikan SMK, yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan tertentu untuk memasuki dunia kerja atau dunia usaha, maka pengembangan SMK harus selalu mengacu

pengembangan keterampilan peserta didik untuk melaksanakan jenis pendidikan tertentu. SMK bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar memiliki keterampilan dan siap terjun ke duniakerja. Penyiapan tenaga kerja harus sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Industri (DU/DI) dan ini harus menjadi pusat perhatian pendidikan kejuruan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dirumuskan kebijakan pengintergrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Lulusan Pendidikan Kejuruan diharapkan mempunyai 5 elemen kompetensi yang sesuai kebutuhan Pemangku Kepentingan :

1. Kebutuhan masyarakat (societal needs)
2. Kebutuhan dunia kerja (industrial needs)
3. Kebutuhan profesional (professional needs)
4. Kebutuhan generasi masa depan (vision)
5. Kebutuhan ilmu pengetahuan (scientific)

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu sinergi dengan pemerintah baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah yaitu perlu dirumuskan kebijakan mengenai :

1. Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
2. Optimalisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan.
3. Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan.
4. Membangun mekanisme kemitraan antara Direktorat Pembinaan SMK dan SMK dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas.
5. Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan Sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.

2. Work shop dan / atau
3. Laboratorium.

SMK harus dilengkapi dengan infrastruktur kompetensi, yang pembangunannya difasilitasi oleh kementerian industri. Infrastruktur dimaksud berupa :

1. SKKNI.
2. LSP.
3. TUK.
4. Asesor kompetensi.

SMK menyelenggarakan Sertifikasi melalui uji kompetensi terhadap siswanya. Uji kompetensi dilaksanakan oleh LSP di TUK yang dimiliki oleh SMK atau perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri.

1.7.2. Program Pemagangan Pasca Kelulusan

Program Pemagangan Pasca kelulusan, keterangannya sama, yang membedakan pihak SMK tidak sepenuhnya mengawal dari mulai mendapatkan sampai selesai Program Pemagangan. Bedanya lagi, dari sisi usia juga syaratnya minimal 18 tahun. Pemagangan Pasca kelulusan bisa juga ke luar negeri. Program Pemagangan keluar negeri penyelenggara langsung ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja .

Pemagangan Pasca kelulusan mengenai uang saku juga lebih besar pendapatannya, karena pihak peserta Pemagangan sudah memenuhi syarat untuk bekerja, sehingga uang lemburpun bisa didapatkan. Uang insentif ditentukan antara 75% - 80% dari UMR.

1.8. Sinergi Sekolah, Pemerintah, Dunia Usaha, dan Asosiasi Profesi

1.8.1. Sinergi Dengan Pemerintah

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan menengah kejuruan yang mengutamakan

pada kebutuhan pasar kerja. Namun pengembangan SMK bukan sekedar pada memperbesar jumlah unit SMK dan jumlah siswa, tetapi bagaimana keberadaan SMK jika dikaitkan dengan potensi wilayah daerah. Sudah menjadi masalah klasik bagi dunia pendidikan SMK di Indonesia pada umumnya, bahwa *link and match* antara output pendidikan SMK dengan DUDI sebagai pengguna output pendidikan SMK belum tercapai. Di antara kebutuhan tersebut, kebutuhan atau tuntutan dunia kerja/usaha/industri, dirasakan amat mendesak, maka prioritas *link and match* diberikan pada pemenuhan kebutuhan dunia kerja. Salah satu masalahnya terletak pada kualitas lulusan SMK yang belum selesai dengan standart kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.

1.2. Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan

1.2.1. Muatan Kurikulum Mengandung Unsur Moral dalam Teori dan Praktek

Lulusan SMK dituntut tidak hanya memiliki *hard skill*, tetapi juga *soft skill*. *Hard skill* dapat dibentuk pada diri siswa melalui masing-masing bidang keahlian sesuai dengan jurusan yang diambilnya di SMK. Sementara *soft skill* merupakan keterampilan kepribadian yang terbentuk karena penanaman nilai-nilai kebajikan, moral atau dalam bahasa agama disebut dengan akhlak. Dalam bahasa kebijakan di era Pemerintah Jokowi sering disebutnya juga dengan "Pendidikan Karakter", yang telah diwacanakan sebagai solusi untuk membentuk kepribadian yang baik pada diri siswa.

Tujuan pendidikan karakter selaras dengan tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, yang menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Sementara isi Pendidikan Karakter adalah nilai dan keterampilan yang diberikan oleh pendidik dalam rangka membentuk karakter peserta didik. Isi Pendidikan Karakter berupa nilai-nilai yang perlu disampaikan oleh pendidik untuk membentuk karakter siswa adalah:

1. Tata tertib siswa di sekolah,
2. Tata tertib siswa di kelas,
3. Nilai-nilai kesopanan,
4. Nilai-nilai kebangsaan,
5. Nilai-nilai kejujuran,
6. Nilai-nilai kesabaran,
7. Nilai-nilai kemandirian.

Penguasaan *soft skill* sangat penting dalam perkembangan usia siswa. *Soft skill* lah yang akan membimbing lebih jauh karakter siswa ketika yang bersangkutan sudah masuk ke dalam DUDI. Ketika seseorang sudah memasuki dunia kerja, menguasai *hard skill* cenderung statis, terkecuali akan beradaptasi dengan kemunculan inovasi-inovasi baru terkait dengan perkembangan yang terkait dengan *hard skill*. Namun terkait dengan *soft skill* akan bersentuhan dan bersinggungan langsung dalam kehidupan sehari-hari di DUDI. Siswa akan bersentuhan dengan beragam manusia dengan segala tabiatnya, baik yang buruk, baik, maupun yang pertengahan (*muqtashid*), yang jujur maupun tidak jujur, yang sopan maupun tidak sopan, yang berintegritas maupun yang tanpa integritas. Menghadapi realitas ini, maka menjadi penting melakukan penguatan *soft skill* atau pendidikan karakter.

Materi pendidikan karakter mencakup pengertian, langkah-langkah, dan manfaat pendidikan karakter. Sebagai contoh untuk nilai-nilai kesopanan, maka cakupan materinya adalah pengertian kesopanan, langkah-langkah menjadi sopan, dan manfaat kesopanan.

Dalam rangka pembentukan karakter siswa yang tidak hanya memiliki *hard skill*, tapi juga *soft skill*, perlu adanya pengembangan metode pembelajaran yang mampu:

4. Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan.
5. Memberi uang saku kepada peserta pemagangan.
6. Mengevaluasi peserta pemagangan.
7. Memberikan sertifikat.

Pada proses pemagangan antara SMK dengan Penyelenggara Pemagangan harus Link & Mach. Program keahlian pada SMK disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan pada setiap program keahlian di SMK disusun berbasis kompetensi mengacu pada :

1. SKKNI bidang industry.
2. Standart internasional dan atau
3. Standart khusus.

Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan :

1. Asosiasi industry
2. Perusahaan industri dan atau
3. Perusahaan kawasan industri

SMK harus memiliki guru bidang studi produktif sesuai dengan kebutuhan program keahlian. SMK dapat memanfaatkan karyawan purna bhakti dari perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri yang memiliki kesesuaian kompetensi sebagai guru bidang study produktif di SMK.

Karyawan purna bhakti harus mendapat pelatihan untuk pelatih (*training for trainer*) bidang kompetensi pedagogik. Pelatihan dapat difasilitasi oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Peningkatan kompetensi guru bidang studi produktif dapat dilakukan melalui pemagangan industry. Pemagangan industri difasilitasi oleh perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri.

Untuk menunjang praktikum pembelajaran berbasis kompetensi, SMK dilengkapi dengan :

1. Teaching factory.

Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan.

Perjanjian pemagangan memuat:

1. Hak dan kewajiban peserta pemagangan
2. Hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan
3. Program pemagangan
4. Besarnya uang saku.

Perjanjian pemagangan harus diketahui dan disahkan oleh Dinas Tenaga kerja kabupaten/kota setempat. Pengesahan harus selesai dalam 3 hari. Peserta pemagangan berhak memperoleh :

1. fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan.
2. uang saku, yang meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif peserta pemagangan
3. perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan dan kematian.
4. Sertifikat.

Peserta pemagangan berkewajiban

1. Mentaati perjanjian pemagangan.
 2. Mengikuti pemagangan sampai selesai.
 3. Mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan.
 4. Menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan
- Penyelenggara pemagangan berhak :

1. Memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan.
2. Memberitahukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.

Penyelenggara Pemagangan berhak :

1. Membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program yang ditetapkan.
2. Memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan.
3. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

1. Memberikan teladan untuk memberikan kesan keyakinan peserta didik.
2. Mengklarifikasi nilai karakter/kepribadian yang harus dimiliki kepada peserta didik.
3. Mengidentifikasi dan membangun minat serta pengalaman peserta didik.
4. Memberikan peserta didik untuk belajar kelompok bersama, diskusi, bermain peran, atau yang lainnya.
5. Bercerita, bernyanyi, atau bermain bersama murid dalam rangka penanaman nilai.

Selain itu perlu juga merekonstruksi kurikulum yang mampu melahirkan lulusan SMK yang bukan saja menguasai *hard skill*, tapi juga *soft skill*. Caranya bukan dengan mendikotomi secara ekstrim kurikulum yang terkait dengan *hard skill* dan *soft skill*, tapi kurikulum yang mampu mengintegrasikan *hard skill* dan *soft skill* secara bersamaan. Dalam kurikulum ini penting menuangkan hal yang bersikap *soft skill* ke dalam hal yang berkenaan dengan *hard skill*.

Kurikulum yang mampu mengintegrasikan *hard skill* dan *soft skill* juga harus tergambar secara tegas dalam setiap mata pelajaran. Mata pelajaran setidaknya harus menyangkut mata pelajaran *soft skill* yang bersifat normatif, menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai secara konstruktif. Adapun pengembangan metode pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik adalah:

1. Memberikan keteladanan kepada siswa dengan pribadi yang baik,
2. Mengingatkan peserta agar selalu ingat bahwa mereka adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk membangun pengertian yang mendalam bahwa manusia hidup di dunia ini dengan aturan Tuhan dan tidak boleh hidup dengan seenaknya,
3. Memusatkan kebutuhan peserta didik akan nilai-nilai kehidupan dan apa-apa yang dibutuhkan sebagai lulusan SMK, dan
4. Membangun motivasi yang kuat pada diri siswa.

Selain itu, tentu saja dibutuhkan mata pelajaran produktif, yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktik. Oleh karena itu, pendidik harus dapat memilah dalam memberikan metode penyampaian kepribadian pada siswa. Adapun metode yang dapat dilakukan oleh guru adalah:

1. Memberikan teladan yang baik pada peserta didik,
2. Mengklarifikasi karakter/kepribadian apa sajakah yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah memiliki keahlian dalam mata pelajaran produktif,
3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan,
4. Memberikan kepada para siswa untuk berlatih dan kerja tim selama melaksanakan praktik,
5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menarik kesimpulan atas pelajaran yang telah diberikan,
6. Menasihati siswa agar bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, dan
7. Menasihati siswa untuk mengunpulkan tugas tepat pada waktunya.

Sementara yang semestinya dilakukan oleh siswa adalah:

1. Mentaati peraturan yang ada. Peraturan tersebut adalah peraturan tata tertib siswa di sekolah, tata tertib siswa di kelas, tata tertib siswa di luar sekolah, serta tata tertib lain yang dibuat oleh sekolah.
2. Mendengarkan dan mengamalkan pesan moral yang disampaikan oleh guru.
3. Berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang baik.
4. Membawa buku saku siswa setiap hari.

Sementara yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah adalah:

1. Memberlakukan norma-norma di sekolah.

yang berbadan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Peserta Pemagangan disyaratkan:

1. Usia paling rendah 17 tahun dan harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali.
2. Sehat Jasmani dan rohani.
3. Lulus seleksi.

Yang dimaksud peserta pemagangan ini adalah siswa yang masih duduk di kelas 3 pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Penyelenggara Pemagangan harus memiliki:

1. Program Pemagangan.
2. Sarana dan Prasarana.
3. Pembimbing Pemagangan.

Penyelenggara Pemagangan menyusun Program Pemagangan:

1. nama Program Pemagangan
2. tujuan Program Pemagangan
3. kompetensi yang akan ditempuh
4. perkiraan waktu Pemagangan
5. persyaratan peserta Pemagangan
6. persyaratan Pembimbing Pemagangan
7. kurikulum dan silabus

Program Pemagangan mengacu pada:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI)
2. Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK)
3. Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI)

Program Pemagangan meliputi:

1. Pemberian teori dan praktek di unit pelatihan Dilaksanakan paling banyak 25% dr komposisi program pemagangan.
2. Praktek kerja di Unit produksi Perusahaan Dilaksanakan paling sedikit 75% dari komposisi program Pemagangan. Jangka waktu pemagangan dibatasi paling lama 3 bulan.

peserta didik di tempat kerja agar lebih fokus memberikan bimbingan dan arahan sesuai dengan proposal yang telah disusun, pihak sekolah juga dapat menganggarkan/ memberikan insentif bagi para instruktur di tempat kerja. Pemberian insentif tersebut selain dapat lebih mengikat tanggung jawab tempat praktek kerja, juga menjadi bentuk apresiasi bagi pegawai di tempat kerja yang telah membimbing peserta didik di tengah mengerjakan tugas utama/ kewajiban terhadap institusi. Oleh karena tidak dipungkiri bahwa membimbing peserta praktek kerja, menjadi tugas tambahan bagi pegawai di tempat kerja.

1.7. Pemagangan Pra dan Pasca Kelulusan

1.7.1. Pemagangan Pra Kelulusan

Pemagangan merupakan program tahunan bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung, dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.

Penyelenggara pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum, milik perorangan, milik persekutuan, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ada istilah lainnya bahwa perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan Pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah Instansi pemerintah

2. Memberikan kearifan-kearifan local kepada siswa lewat kegiatan intra dan ekstrakurikuler.
3. Mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan karakter siswa secara berkala, seperti:
 - a. Kegiatan keagamaan untuk meningkatkan akhlak yang mulia;
 - b. kegiatan out bond untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kerja tim;
 - c. kegiatan latihan kepemimpinan untuk meningkatkan rasa kedisiplinan, kepemimpinan, serta jiwa mandiri.
4. Mengadakan pelatihan terhadap guru-guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Pelatihan tersebut berisi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter;
5. Melakukan pengontrolan terhadap perkembangan pemberian nilai-nilai karakter/kepribadian.
6. mewajibkan penggunaan baju batik pada salah satu hari untuk guru dan siswa.
7. mewajibkan siswa untuk menyanyikan lagu kebangsaan pada jam pertama pelajaran akan dimulai.
8. membuat buku saku siswa yang berisi norma-norma dan kearifan lokal, serta lembar point hukuman terhadap pelanggaran dan point hadiah untuk tindak kebaikan.

Untuk membentuk karakter siswa yang bukan hanya mumpuni dalam hard skill dan soft skill, perlu juga mendapat penopang dari pihak sekolah. Beberapa hal yang penting untuk dilakukan oleh pihak sekolah:

1. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga luar sekolah dalam upaya peningkatan karakter siswa, seperti:
 - a. Lembaga kepolisian atau militer untuk membina kedisiplinan siswa dan pemahaman bela Negara;
 - b. Organisasi kemasyarakatan yang bersifat agamis untuk pembinaan akhlak mulia; dan
 - c. Lembaga Trainer/Motivator untuk membina rasa

semangat dan percaya diri.

2. Melakukan supervisi terhadap guru terkait dengan hasil dari pelaksanaan pendidikan karakter secara terus-menerus dan berkesinambungan.
3. Melakukan pengontrolan terhadap buku saku siswa.
4. Menjalin hubungan yang baik dengan orang tua siswa

1.2.2. Kesesuaian Kurikulum dengan Regulasi dan Kebutuhan DUDI

Substansi dari pendidikan kejuruan harus menampilkan karakteristik pendidikan kejuruan yang tercermin dalam aspek-aspek yang erat dengan perencanaan kurikulum, yaitu :

1. **Orientasi** (*Orientation*)

Kurikulum pendidikan kejuruan telah berorientasi pada proses dan hasil atau lulusan. Keberhasilan utama kurikulum pendidikan kejuruan tidak hanya diukur dengan keberhasilan pendidikan peserta didik di sekolah saja, tetapi juga dengan hasil prestasi kerja dalam dunia kerja. Finch dan Crunkilton (1984 : 12) mengemukakan bahwa: Kurikulum pendidikan kejuruan berorientasi terhadap proses (pengalaman dan aktivitas dalam lingkungan sekolah) dan hasil (pengaruh pengalaman dan aktivitas tersebut pada peserta didik).

2. **Dasar kebenaran/Justifikasi** (*Justification*)

Pengembangan program pendidikan kejuruan perlu adanya alasan atau justifikasi yang jelas. Justifikasi untuk program pendidikan kejuruan adalah adanya kebutuhan nyata tenaga kerja di lapangan kerja atau di dunia usaha dan industri. Dasar kebenaran/justifikasi pendidikan kejuruan menurut Finch dan Crunkilton (1984: 12), meluas hingga lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketika kurikulum berorientasi pada peserta didik, maka dukungan bagi kurikulum tersebut berasal dari peluang kerja yang tersedia bagi para lulusan.

3. **Fokus**

Fokus kurikulum dalam pendidikan kejuruan tidak terlepas pada pengembangan pengetahuan mengenai suatu bidang

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja
- 1.3 Identitas Guru Pembimbing dan Peserta Didik
- 1.4 Periode Pelaksanaan Praktek Kerja

BAB II PROGRAM PRAKTEK KERJA

- 3.1. Kompetensi Dasar Peserta Didik
- 3.2. Topik Pembelajaran/Pekerjaan yang Dipelajari di Tempat Praktek Kerja
- 3.3. Monitoring Pelaksanaan Praktek Kerja
- 3.4. Indikator Penilaian Praktek Kerja
- 3.5. Rencana Evaluasi Praktek Kerja

BAB III PENUTUP

- 3.1. Simpulan
- 3.2. Rekomendasi

LAMPIRAN

Selain penyusunan proposal praktek kerja, ada hal yang juga harus diperhatikan oleh tempat praktek kerja/industri agar pelaksanaan program praktek kerja peserta didik dapat berjalan ideal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *link and match* dengan Industri, tempat praktek kerja pun harus memperhatikan beberapa hal agar pelaksanaan praktek kerja mencapai kualitas ideal. Tempat praktek kerja sudah semestinya dapat menempatkan siswa di unit kerja/divisi yang sesuai dengan jenjang kualifikasi dan kompetensi yang akan dicapai, menyediakan instruktur sebagai tenaga pembimbing siswa, dan memberikan sertifikat kepada peserta didik yang telah menyelesaikan praktek kerja.

Selain hal-hal di atas, untuk mengikat instruktur/pembimbing

bagi tiap peserta didik/kelompok peserta didik yang akan melaksanakan praktek kerja berkoordinasi dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Industri. Hal tersebut sebagai bentuk upaya penyalarsan dalam mengolaborasikan kurikulum pembelajaran dengan praktek kerja. Selain itu, tiap sekolah juga harus memiliki standar dan acuan untuk menyusun proposal praktek kerja. Dengan demikian, meskipun disusun oleh guru pembimbing yang berbeda-beda, tetapi gaya narasi dan sistematika yang digunakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sekolah. Selanjutnya, proposal praktek kerja yang telah disusun ditandatangani Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Industri sebagai bentuk pengesahan.

Berikut adalah contoh format penulisan proposal praktek kerja:

JUDUL PROPOSAL

(Judul, logo sekolah, nama sekolah, program keahlian/kejuruan, kota domisili sekolah dan tahun penyusunan)

LEMBAR PENGESAHAN

(Memuat tanda tangan guru pembimbing sebagai penyusun proposal dan tanda tangan Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Industri sebagai bentuk pengesahan dari pihak sekolah).

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

tertentu, tetapi harus secara simultan mempersiapkan peserta didik yang produktif. Finch dan Crunkilton (1984: 13) mengemukakan bahwa: Kurikulum pendidikan kejuruan berhubungan langsung dengan membantu siswa untuk mengembangkan suatu tingkat pengetahuan, keahlian, sikap dan nilai yang luas. Setiap aspek tersebut akhirnya bertambah dalam beberapa kemampuan kerja lulusan. Lingkungan belajar pendidikan kejuruan mengupayakan di dalam mengembangkan pengetahuan peserta didik, keahlian meniru, sikap dan nilai serta penggabungan aspek-aspek tersebut dan aplikasinya bagi lingkungan kerja yang sebenarnya.

Seluruh kemampuan tersebut di atas, dapat dikuasai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang diberikan, yaitu berupa rangsangan yang diaplikasikan baik pada situasi kerja yang tersimulasi lewat proses belajar mengajar di sekolah maupun situasi kerja yang sebenarnya pada dunia usaha atau industri (pembelajaran di dunia kerja). Dari hasil belajar atau kemampuan yang telah dikuasai diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan diri peserta didik, sehingga mereka mampu bekerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidang kejuruan. Lulusan pendidikan kejuruan, diharapkan menjadi individu yang produktif yang mampu bekerja menjadi tenaga kerja menengah dan memiliki kesiapan untuk menghadapi persaingan kerja. Kehadiran SMK ini didambakan masyarakat khususnya masyarakat yang berkecimpung langsung dalam dunia kerja. Dengan catatan, bahwa lulusan pendidikan kejuruan memang mempunyai kualifikasi sebagai (calon) tenaga kerja yang memiliki keterampilan vokasional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan

yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1979), bahwa : “Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah atau in-school success standards dan kualitas menurut ukuran masyarakat atau out-of school success standards”. Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikuler yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja, sedangkan kriteria kedua, meliputi keberhasilan peserta didik yang tertampilkan pada kemampuan unjuk kerja sesuai dengan standar kompetensi nasional ataupun internasional setelah mereka berada di lapangan kerja yang sebenarnya. Upaya untuk mencapai kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja tersebut, perlu didasari dengan kurikulum yang dirancang dan dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders. Kurikulum pendidikan kejuruan secara spesifik memiliki karakter yang mengarah kepada pembentukan kecakapan lulusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan tertentu. Kecakapan tersebut telah diakomodasi dalam kurikulum SMK yang meliputi kelompok Normatif, Adaptif dan kelompok Produktif. Kurikulum yang diimplementasikan di SMK saat ini, khusus untuk kelompok produktif masih menggunakan kurikulum tahun 2004, sedangkan untuk kelompok normatif dan adaptif sudah menggunakan model pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006. Pada tataran implementasi kurikulum ini menuntut kreativitas guru di dalam memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kompetensi peserta didik, karena betapapun baiknya kurikulum yang telah direncanakan pada akhirnya berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada sentuhan aktivitas dan kreativitas guru sebagai ujung tombak implementasi suatu kurikulum. Pendidikan dan pelatihan di SMK; khususnya pada program produktif yang sesuai dengan bidang keahlian, secara ideal dituntut untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang

1.6.1. Data primer

Data ini diperoleh dengan melakukan survei langsung tempat kerja dan melaksanakan wawancara dengan perwakilan pegawai di tempat praktek kerja yang ditetapkan sebagai penanggung jawab pengelola praktek kerja bagi peserta didik, mewawancarai peserta didik (jenjang kelas di atas atau yang telah lulus sekolah) yang pernah praktek kerja di tempat praktek kerja yang sama. Observasi dan wawancara dilakukan untuk menghimpun data dan informasi tentang proses kerja/ produksi di tempat kerja, tugas, pokok dan fungsi tempat praktek kerja, mengetahui keunikan/ ciri khas tempat praktek kerja, mengetahui butir kegiatan kerja yang telah menjadi kebiasaan atau yang telah resmi ditetapkan oleh institusi untuk dikerjakan oleh peserta praktek kerja, dan memetakan/menarik benang merah keselarasan tempat praktek kerja dengan kejuruan dan kompetensi peserta didik.

1.6.2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan menganalisis bahan pustaka baik secara daring (*online*) ataupun luring (*offline*). Analisis bahan pustaka secara daring misalnya dapat dilakukan dengan mengunjungi situs web resmi (*official website*) tempat praktek kerja, akun media sosial resmi (*official account*) tempat praktek kerja, artikel terkait tempat praktek kerja, dan lain-lain. Sedangkan analisis bahan pustaka secara luring dapat dilakukan dengan membaca buku, leaflet, booklet, produk hukum/kebijakan yang dihasilkan tempat praktek kerja (biasanya jika tempat praktek kerja yang berperan sebagai regulator/instansi pemerintah), artikel terkait tempat kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan praktek kerja. Hal tersebut pun dilakukan tak lain untuk menghimpun data dan informasi tentang proses kerja/ produksi di tempat kerja, tugas, pokok dan fungsi tempat praktek kerja, mengetahui keunikan/ciri khas tempat praktek kerja, dan memetakan/ menarik benang merah keselarasan tempat praktek kerja dengan kejuruan dan kompetensi peserta didik.

Saat penyusunan proposal praktek kerja, guru pembimbing

Mencapai pelaksanaan praktek kerja yang ideal bukan suatu hal yang mudah. Apalagi berdasarkan data di lapangan, ditemukan bahwa saat pelaksanaan praktek kerja, keterampilan jurusan/bidang kejuruan peserta didik kurang mendapatkan perhatian. Hal tersebut terindikasi berdasarkan temuan lapangan di mana peserta didik diberikan tugas yang sangat teknis, bersifat administratif (bukan praktek sesuai dengan kejuruan), dan belum maksimal untuk mengenal pekerjaan yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) terkini.

Sebagai upaya mencapai pelaksanaan praktek kerja yang ideal, hasil kajian merekomendasikan bahwa terdapat sebuah upaya yang dapat dilakukan pihak sekolah agar praktek kerja sesuai dengan kompetensi dunia usaha serta peserta didik memperoleh manfaat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan (*link and match*). Upaya tersebut adalah menyusun rancangan pelaksanaan praktek yang dapat menjadi kerangka acuan bagi siswa, sekolah dan tempat praktek kerja. Rancangan praktek kerja dapat dituangkan dalam sebuah proposal yang disusun oleh pihak sekolah. Proposal tersebut merupakan deskripsi program praktek kerja yang memuat sejumlah kompetensi dasar yang akan dipelajari peserta didik di tempat praktek kerja. Proposal praktek kerja juga dimaksudkan agar dalam pelaksanaan, penempatan peserta didik tepat sasaran.

Sebelum menyusun proposal praktek kerja, pihak sekolah baiknya memetakan dan menetapkan terlebih dahulu guru pembimbing bagi tiap peserta didik/kelompok peserta didik yang akan melaksanakan praktek kerja. Ini menjadi hal penting karena penyusunan proposal praktek kerja selanjutnya menjadi tanggung jawab tiap guru pembimbing. Jika guru pembimbing sudah ditetapkan, maka langkah selanjutnya yang ditempuh oleh guru pembimbing sebagai representasi pihak sekolah dalam menyusun proposal praktek kerja adalah mengumpulkan data dan informasi tentang tempat pelaksanaan praktek kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh guru pembimbing melalui dua cara, yaitu:

mampu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik di dalam penguasaan kompetensi atau kemampuan kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Pendekatan pembelajaran tersebut terdiri dari: Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency Based Training*), Pelatihan Berbasis Produksi (*Production Based Training*) dan Pelatihan Berbasis Industri. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran ini diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik di dalam penguasaan seluruh kompetensi yang harus dikuasai sesuai Standar Kompetensi Nasional, sehingga mereka mampu mengikuti uji level pada setiap akhir semester untuk Kelas X dan XI serta uji kompetensi untuk kelas XII yang dilaksanakan oleh pihak industri sebagai inatitusi pasangan.

4. Sertifikasi profesi.

Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang berwenang. Siswa lulusan SMK bisa memiliki lebih dari satu sertifikat kompetensi, tergantung pada program keahlian yang diambilnya di SMK. Misalnya lulusan SMK dengan program keahlian Teknik Mesin, bisa memiliki enam sertifikat untuk kompetensi Teknik Pengelasan, Teknik Fabrikasi Logam, Teknik Pengecoran Logam, Teknik Pemesinan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, dan Teknik Gambar Mesin. Sertifikat kompetensi untuk siswa SMK diberikan setelah siswa dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi keahlian (UKK). UKK adalah bagian dari ujian nasional (UN) untuk peserta didik SMK, yang terdiri atas ujian teori kejuruan dan ujian praktik kejuruan. Setelah siswa lulus UKK, sertifikat kompetensi diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). SMK yang telah dinyatakan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) oleh BNSP juga bisa menyelenggarakan ujian kompetensi keahlian secara

mandiri dan menjadi tempat ujian kompetensi bagi SMK lain di sekitarnya.

Salah satu tujuan UKK adalah memfasilitasi kerja sama SMK dengan DUDI untuk melaksanakan ujian kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. Dalam pelaksanaan UKK, SMK melibatkan DUDI atau institusi berskala internasional, nasional atau lokal, yang memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi keahlian siswa yang diujikan. Diharapkan, DUDI tersebut bisa melihat secara langsung dan mengakui kompetensi para siswa SMK sehingga bisa langsung diserap sebagai tenaga kerja oleh DUDI.

1.3. *Link and Match* Sekolah Menengah Kejuruan

1.3.1. Adaptasi Konsep Pembelajaran SMK dengan DUDI

1. Kesesuaian Kurikulum dengan DUDI

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 terkait revitalisasi SMK menyebutkan empat poin yang menjadi fokus melingkupi revitalisasi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan lulusan. Kurikulum untuk jenjang SMK sering dianggap kaku oleh berbagai kalangan yang berdampak sulit untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap dipakai oleh dunia usaha dan industri. Dengan revitalisasi ini, dari tiga kurikulum di SMK ada satu kurikulum yang dirancang lebih fleksibel. Artinya, kurikulum ini menyesuaikan dengan kebutuhan industry.

Sebetulnya konsep *link and match* sempat diluncurkan Mendiknas Prof. Wardiman Djojonegoro dalam rangka menjawab kebutuhan dunia Usaha dan Industri baik dalam maupun luar negeri, khususnya dalam negeri. Disamping kurikulum, revitalisasi juga dilakukan dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, terutama guru. Selain ketersediaan, revitalisasi juga menasar pada perbaikan kompetensi guru. Sebagai solusi jangka pendek, pemenuhan kebutuhan guru produktif dilakukan melalui program keahlian ganda.

1.5.3. Pembimbing Pemagangan

Pembimbing pemagangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Karyawan tetap.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program pemagangan.
4. Memiliki kompetensi Metodologi pelatihan.
5. Surat Penunjukan Pembimbing dari manajer Personalia atau di atasnya.
6. Memahami regulasi pemagangan

1.6. Praktek Kerja

Praktek kerja menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di SMK dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan kejuruan/ konsentrasi yang dipilih peserta didik. Praktek kerja yang diselenggarakan SMK merupakan entitas penting baik bagi peserta didik, sekolah maupun dunia usaha. Bagi peserta didik, praktek kerja dapat menjadi sebuah medium untuk mempraktekan berbagai teori yang telah diperoleh di bangku sekolah, mengenal etos dan iklim kerja dunia usaha, memperoleh pengalaman dan pengetahuan bekerja sesuai dengan bidang kejuruan/konsentrasi. Bagi pihak sekolah, praktek kerja menjadi sebuah medium untuk membina hubungan baik dengan dunia usaha, mengembangkan program, metode pembelajaran, sarana dan prasarana di sekolah sesuai dengan hasil observasi di tempat kerja, dan meningkatkan kualitas lulusan. Selanjutnya, praktek kerja bagi dunia usaha dapat memberikan manfaat di antaranya menjadi medium untuk mengembangkan hubungan baik dengan *stakeholders* yang akan mencetak calon tenaga kerja, memperoleh gambaran kualitas calon tenaga kerja, membantu kegiatan publisitas tempat kerja untuk mengomunikasikan produk/jasa/kebijakan yang dihasilkan. Manfaat-manfaat tersebut dapat dicapai jika pelaksanaan praktek kerja berjalan ideal.

memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan.

Penyelenggara pemagangan (perusahaan) harus memiliki beberapa persyaratan/kriteria :

1.5.1. Program Pemagangan

Program pemagangan disusun oleh Penyelenggara Pemagangan. Program Pemagangan meliputi :

1. Nama Program Pemagangan.
2. Tujuan Program Pemagangan.
3. Kompetensi yang harus ditempuh.
4. Perkiraan Waktu Pemagangan.
5. Persyaratan Peserta Pemagangan.
6. Persyaratan Pembimbing Pemagangan.
7. Kurikulum dan Silabus

Program pemagangan harus mengacu pada

1. Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
2. Standart Kompetensi Kerja Khusus.
3. Standart Kompetensi Kerja Nasional

Program Pemagangan meliputi:

1. Pemberian teori dan praktek di Unit Pelatihan yang dilaksanakan paling banyak 25% dari komposisi Program Pemagangan.
2. Praktek kerja di Unit Produksi Perusahaan dilaksanakan paling sedikit 75% dari komposisi Program Pemagangan.

1.5.2. Sarana dan Prasarana Pemagangan

Sarana dan prasarana ideal yang seharusnya dimiliki di tempat pemagangan meliputi :

1. Ruang teori.
2. Ruang Simulasi / praktek.
3. Kelengkapan Alat keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Buku kegiatan (*log book*) bagi peserta pemagangan.

Revitalisasi yang juga tidak kalah penting adalah berkaitan kerja sama antara SMK dengan DUDI, juga perlu perbaikan kerja sama dengan perguruan tinggi maupun antar-kementerian. Dan yang terakhir adalah revitalisasi kualitas lulusan SMK yang harus melalui uji kompetensi dan sertifikasi yang diakui DUDI. Karena kualitas lulusan SMK akan menentukan apakah SMK bisa merespons kebutuhan DUDI atau tidak.

Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk merespons masalah kualitas lulusan SMK adalah melalui Lomba Kreativitas Siswa (LKS). Hal tersebut terlihat lewat fakta bahwa sekolah yang berhasil mengirimkan peserta didiknya ke ajang ini merupakan SMK yang memiliki siswa kreatif dan terbaik di daerahnya. Oleh karena itu, dengan LKS ini diharapkan semakin banyak baik para siswa maupun SMK yang terpacu untuk berkompetisi dan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik pula.

2. Konsep Pembelajaran Diasumsikan dengan Kondisi Praktis DUDI

Nampaknya konsep Pembelajaran Teaching Factory ini secara teoritis sudah bisa ikut menjawab kebutuhan DUDI, namun implementasi konsep ini membutuhkan daya dukung yang kuat dan serius, baik dari aspek pengalaman empirik SDM/ Guru, kesiapan mental siswa, bahan baku, dan infra struktur/ peralatan pendukung. Beberapa hal yang harus dipahami dalam konsep pembelajaran Teaching Factory ini (TEFA) di antaranya sbb:

a. Orientasi Sistem Pembelajaran Teaching Factory

Pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen. Dalam dunia broadcast televisi diperlukan keahlian yang focus dan spesifik. Artinya siswa dituntut untuk lebih menekuni salah keahlian tertentu disamping keahlian lainnya. misalnya kamera, audio, pencahayaan, penyuntingan/ editing dsb.

Keahlian tersebut masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda dan khusus, sehingga harus ditekuni secara serius. Selain itu pula memang dalam dunia broadcast TV fungsi dan jabatan tersebut memiliki posisi dan porsi skill/keahlian yang berbeda, seperti cameraman, lightingman, audioman, editor dsb. Sementara konsep pembelajaran yang sedang berlangsung bisa dikatakan abu-abu, sehingga ketika siswa lulus SMK, mereka belum memiliki keahlian atau keterampilan secara khusus sesuai kebutuhan pasar.

- b. **Penerapan Konsep Teaching Factory di SMK/Broadcast**
Prinsip dasar teaching factory (TIFA) adalah pengintegrasian pengalaman dunia kerja ke dalam kurikulum sekolah. Semua peralatan dan bahan serta pelaku pendidikan disusun dan dirancang untuk melakukan proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan produk (barang dalam ataupun jasa). TIFA merupakan perpaduan dari pembelajaran berbasis produksi dan pembelajaran kompetensi. Dalam pembelajaran berbasis produksi, siswa terlibat langsung proses produksi, sehingga kompetensinya dibangun berdasar kebutuhan produksi. Dalam teaching factory, sekolah melaksanakan kegiatan produksi atau layanan jasa yang merupakan bagian dari PBM. Dengan demikian sekolah diharuskan memiliki sebuah pabrik, workshop/studio mini atau unit usaha lain untuk kegiatan pembelajaran.
- c. **Melalui Realisasi Praktek Produksi Program/konten dalam Pembelajaran**

- 1) mempersiapkan individu menjadi pekerja;
- 2) mempersiapkan individu untuk terus belajar ke level yang lebih tinggi;
- 3) membantu siswa memilih bidang kerja yang sesuai kemampuannya;
- 4) menunjukkan bahwa 'learning by doing' sangat penting bagi efektivitas pendidikan dan menumbuhkan kreatifitas;

kemajuan masa depan harus dapat dilaksanakan secepat mungkin (*education in short*)

2. Pendidikan kejuruan dalam pengembangannya harus berorientasi kepada jenis-jenis pekerjaan yang langsung dibutuhkan di lapangan kerja
3. Pendidikan kejuruan diatur sedemikian rupa supaya peserta didik dapat keluar masuk lembaga pendidikan secara mudah (*entry exit system*)
4. Pendidikan kejuruan harus disesuaikan dengan permintaan pasar (*demand driven*), bukan pasar yang menyesuaikan dengan pendidikan kejuruan.
5. Pengembangan pendidikan kejuruan harus terbuka sehingga dimungkinkan terjadinya interaksi antar disiplin ilmu serta disiplin teknologi (*cross discipline*)
6. Pendidikan kejuruan harus berani mengembangkan teknologi yang sedang dan akan terus berkembang (*forward technology*).
(Ki Supriyoko, 2000)

Untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan dunia usaha dan industri tersebut, maka perlu sumber daya manusia yang *hi-tech* yang mampu bersaing dalam dunia kerja. Oleh sebab itu penting membekali peserta didik dengan kemampuan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komputerisasi di era digital milenial seperti sekarang.

1.5. Kriteria Tempat Magang

Beberapa hal yang mesti menjadi perhatian dalam pemagangan:

1. Perusahaan Industri dan/atau perusahaan kawasan industri memfasilitasi pemagangan industri untuk setiap guru bidang study produktif yang mengawal siswa siswanya untuk pemagangan.
2. Pemagangan Industri dilaksanakan sesuai dengan jenjang kualifikasi dan atau kompetensi yang akan dicapai.
3. Penyelenggara pemagangan adalah perusahaan yang

yang dipelajarinya, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan organisasi kerja (antara lain komunikasi dan kolaborasi), diperlukan pengalaman belajar kontekstual dalam berbagai bentuk model pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang dipelajarinya. Atas dasar itulah pada uraian berikut, selanjutnya akan dibahas tentang model-model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan tujuan dan karakteristik pembelajaran pada pendidikan SMK/MAK.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif-mandiri mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Atas dasar itu maka dikembangkan Standar Proses Pembelajaran di SMK/MAK mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi; merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran pada satuan pendidikan SMK/MAK untuk mencapai kompetensi lulusan.

Proses pembelajaran diselenggarakan berbasis aktivitas secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Selain itu proses pembelajaran juga harus memberikan ruang untuk berkembangnya keterampilan abad XXI yaitu kreatif, inovatif, berfikir kritis, pemecahan masalah, kolaboratif, dan komunikatif untuk menyongsong era revolusi industri 4.0 dan yang akan datang. Era ini dikenal juga dengan fenomena *disruptive innovation* yang menekankan pada pola ekonomi digital, kecerdasan buatan, *big data*, dan robotik.

1.4.2. Pendidikan kejuruan

Perubahan teknologi tersebut berimplikasi pada penyesuaian penyelenggaraan pembekalan keterampilan vokasional kepada peserta didik dibidang kejuruan, oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa prinsip pendidikan kejuruan, antara lain:

1. Pendidikan kejuruan yang prospektif dan berorientasi pada

- 5) mendefinisikan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja;
- 6) memperluas cakupan kesempatan rekrutmen bagi siswa;
- 7) memberi kesempatan kepada guru memperluas wawasan instruksional;
- 8) membantu siswa dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja, bagaimana menjalin kerjasama dalam dunia kerja yang aktual, dll;
- 9) memberi kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilannya sehingga dapat membuat keputusan tentang karir yang akan dipilihnya;
- 10) memberi kesempatan kepada guru untuk membangun 'jembatan instruksional' antara kelas dengan dunia kerja;
- 11) membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa belajar.

d. Hal yang diharapkan dalam konsep Teaching Factory

- 1) Menyadarkan siswa bahwa dalam penguasaan keterampilan siswa tidak hanya mempraktikkan soft skill dalam pembelajaran, (bekerja dalam tim, melatih kemampuan komunikasi interpersonal dari buku), tetapi juga merealisasikan pengetahuan secara langsung dan latihan bekerja untuk memasuki dunia kerja secara nyata. (Hadlock, Wells, Hall, Clifford, Winowich, dan Burns 2008: 14).
- 2) Sarana pelatihan dan praktik berbasis produksi secara langsung bagi siswa yang berorientasi pada pasar;
- 3) Mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri siswa melalui kegiatan produksi;
- 4) Menjalin hubungan yang lebih baik dengan dunia usaha dan industri serta masyarakat lain atas terbukanya fasilitas untuk umum dan hasil-hasil

d. Konsep Teaching Factory menemukan adanya beberapa faktor yaitu:

- 1) pembelajaran keterampilan murni yang biasa saja tidak cukup;
- 2) Siswa dan Guru melalui pembelajaran yang berbasis produksi, mendapat pengalaman langsung menggandengkan berbagai komponen kompetensi dalam satu ikatan;

1.3.2. Konsep Teaching Factory Memberikan Ruang dan Peluang bagi Siswa untuk Lebih Berkreasi

Melalui pembelajaran berbasis team yang melibatkan siswa, guru, para praktisi dan partisipasi industry televisi/media memperkaya proses pendidikan dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak termasuk lembaga lembaga penyiaran, khususnya stasiun TV lokal yang menjadi mitra SMK. Kreatifitas dan potensi siswa akan muncul dengan diberikannya kesempatan terjun ke dunia Industri, sehingga akan semakin memahami kebutuhan realistik terhadap dunia industry/usaha. Lembaga pendidikan/SMK termasuk para guru dapat mempertimbangkan persentase dan metode pembelajaran sesuai kebutuhan pasar secara proporsional.

Sangat disadari untuk dapat menopang SMK Jurusan Broadcast/Penyiaran TV membutuhkan fasilitas dan infrastruktur dengan biaya relative cukup mahal dan fasilitas yang digunakan harus adaptable dengan perkembangan teknologi saat ini. Maka agar perkembangan teknologi tetap dapat diikuti para siswa, sekolah SMK melalui Direktorat PSMK harus dapat bersinergi dengan lembaga lembaga penyiaran/stasiun TV lokal/TV nasional setempat agar para siswa dapat melakukan magang tanpa ada kendala. Melalui magang tersebut para siswa disamping dapat memahami dunia kerja sebenarnya, juga mengetahui perkembangan teknologi terbaru melalui station TV tersebut.

peradaban suatu bangsa. Bangsa yang besar dan maju akan tampak dari seberapa besar pertumbuhan generasi yang menempuh jenjang pendidikan yang layak. Hal tersebut juga otomatis akan tampak dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industrinya. Sistem pendidikan yang berjenjang telah berjalan dinamis selama ini mencetuskan sebuah ide dan harapan baru akan adanya perubahan sistem di dunia pendidikan. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia pun mengikuti pergerakan dinamis dunia pendidikan guna menjawab tantangan jaman. Oleh karena itu pendidikan kejuruan menjadi sebuah tawaran yang menjanjikan di era pesatnya perkembangan teknologi.

Perkembangan pada dunia kerja ini harus diikuti oleh lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasyah Aliyah Kejuruan (MAK). Pendekatan pengembangan sekolah kejuruan sudah harus mengacu pada *market driven*. Penggunaan pendekatan tersebut memungkinkan terjadinya kesesuaian antara proses pembelajaran di sekolah dengan proses yang terjadi di dunia kerja atau dunia usaha. Sehingga terjadi keselarasan antara penguasaan kompetensi dari lulusan SMK/MAK dengan kebutuhan tenaga kerja. SMK/MAK memiliki tujuan menyiapkan lulusannya untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurumannya. Ini menunjukkan bahwa SMK/MAK sebagai institusi harus menyiapkan lulusannya secara komprehensif dan inklusif, membantu peserta didik menumbuh-kembangkan capaian hasil pendidikan secara bermakna berdasarkan potensi yang dimilikinya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat di mana mereka hidup kelak setelah menyelesaikan pendidikan.

Tugas SMK/MAK di atas, sesuai dengan tuntutan keterampilan kerja abad 21, yakni keterampilan berfikir tingkat tinggi yang meliputi berfikir kreatif, berfikir kritis dan memecahkan masalah. Adapun untuk membangun kemampuan yang lainnya yakni keterampilan literasi dan informasi teknologi, keterampilan untuk hidup mandiri sesuai dengan kompetensi keahlian

kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa memutuskan atau menentukan atas sesuatu. Definisi kompetensi menurut Depdikbud (1994) adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu dan digunakan secara tepat dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Wardiman Djojonegoro (1996: 11) memberikan arti kompetensi sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dengan standar penilaian yang tereferensi pada performansi yang superior atau pada sebuah pekerjaan.

Menjadi kajian dan perhatian serius bagi semua pihak untuk bisa memperbaiki sistem pendidikan kejuruan performanya menjadi lebih sempurna untuk diadopsi oleh industri. Sehingga tujuan awal dari pendidikan kejuruan agar dapat mencetak tenaga kerja tingkat menengah yang handal dan siap pakai dapat terealisasi. Dari hasil uraian ini ada beberapa yang menjadi pertimbangan dan masukan bagi pendidikan kejuruan, salah satunya merubah prosentasi bobot pembelajaran antara teori dan praktek dari yang awalnya 40% teori dan 60% praktek, perlu ditingkatkan dalam aspek pembelajaran praktek yaitu menjadi 30% dalam bentuk teori dan 70% dalam bentuk proaktek. Pertimbangan ini didasarkan pada betapa besarnya tuntutan pangsa pasar terhadap kebutuhan tenaga kerja siap pakai. Pendidikan kejuruan menjadi omong kosong belaka tatkala bobot praktek yang seharusnya dialami oleh peserta didik tidak terlaksana sesuai dengan porsinya.

1.4.1. Pemahaman TIK Pembelajaran terdiri dari proses belajar mengajar

Teknologi selalu berjalan beriringan dengan kemajuan sebuah peradaban. Teknologi yang di hari kemarin dianggap modern (*sunrise technology*) bukan tidak mungkin hari ini sudah mulai *obsolet* atau basi (*sunset technology*). Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi parameter kemajuan pendidikan suatu negeri. Pendidikan memberikan kontribusi besar dalam perubahan

1.4. Metode Pembelajaran

Prosser dan Quigley dalam Surya Dharma (2013) menyatakan bahwa esensi dari pendidikan kejuruan adalah mengajarkan kebiasaan berfikir dan bekerja melalui pelatihan yang berulang-ulang. Terdapat tiga kebiasaan yang harus diajarkan yaitu :

1. Kebiasaan beradaptasi dengan lingkungan kerja,
2. Kebiasaan dalam proses pelaksanaan kerja, dan
3. Kebiasaan berfikir (dalam pekerjaan).

Wenrich dan Galloway (1988) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan dapat diartikan sebagai pendidikan yang spesial yang berfungsi menyiapkan peserta didik untuk memasuki pekerjaan tertentu atau pekerjaan keluarga, atau untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Calhoun (1982) menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan individu peserta didik menjadi tenaga kerja profesional, dan juga siap untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Clarke dan Winch (2007) mendefinisikan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan yang menyiapkan anak-anak muda dan orang dewasa untuk memasuki lapangan kerja, di mana proses pembelajarannya berkaitan dengan masalah dan praktik. Henry dan Thomson dalam Berg (2002) mendeskripsikan pendidikan kejuruan sebagai berikut, pendidikan kejuruan itu identik dengan belajar "bagaimana untuk bekerja", pendidikan kejuruan berupaya bagaimana untuk meningkatkan kompetensi teknik dan posisi seseorang di lingkungan melalui penguasaan teknologi dan pendidikan kejuruan berkaitan erat dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu sering dipandang sebagai sesuatu yang memberikan kontribusi yang kuat terhadap ekonomi nasional.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, siap kerja dan produktif pada bidang tertentu. Pendidikan kejuruan diselenggarakan dengan membawa "suasana kerja ke bangku

sekolah", sehingga didalam prosesnya peserta didik akan belajar "bagaimana cara bekerja". Pendidikan kejuruan membekali peserta didik pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bekerja secara efektif dan efisien, serta kemampuan untuk selalu beradaptasi dan mengantisipasi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

Menurut Trilling and Fadel (2011: 91) pendidikan kejuruan adalah pemecahan problem, sehingga pertanyaan yang muncul bertujuan untuk menemukan solusi: bagaimana membuat pesawat terbang yang lebih aman? Bagaimana membuat kursi yang lebih ergonomis? Bagaimana menggunakan energi matahari untuk memanaskan air dan menghidupkan listrik? Berbeda dengan pendekatan seorang saintis dimulai dengan pertanyaan: mengapa langit itu biru? Mengapa air bisa mengalir ke atas pucuk pohon? Berdasarkan dua pendekatan tersebut, pendidikan menengah kejuruan bertujuan menemukan berbagai solusi untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik.

Pembelajaran dengan replikasi seperti konsep di atas sebenarnya mirip dengan *Teaching Factory* atau *Production Based Training/ Production Based Education and Training/Design Based Training* yang merupakan pembelajaran bentuk rekayasa dan teknologi sebagai strategi perancangan dan penemuan solusi atas problematika kehidupan. Adapun pada konsep sains lebih menekankan metoda penyelidikan dan penemuan untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Pekerjaan di abad ke-21 membutuhkan keterampilan dengan kombinasi baru yaitu pemikiran tingkat tinggi dan komunikasi yang kompleks (Trilling dan Fadel, 2009). Pekerjaan dalam abad ke-21 bertumpu pada kemampuan kreativitas.

Dengan definisi tersebut, sangat tidak mungkin apabila pendidikan kejuruan tidak dibekali dengan beban prakteknya yang memadai untuk membekali peserta didik siap kerja. Sistem pendidikan yang sedang berjalan sekarang proporsi untuk teori 40%, sedangkan praktek 60% dirasa masih kurang proporsinya. Apalagi ditambah dengan beban banyaknya jumlah mata pelajaran yang dibebankan kepada peserta didik.

Terkait dengan mempersiapkan peserta didik untuk mampu bekerja pada bidang tertentu maka kurikulum SMK wajib memuat (UU Menurut UU No 20 Tahun 2003) :

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan kewarganegaraan;
3. Bahasa;
4. Matematika;
5. Ilmu Pengetahuan Alam;
6. Ilmu Pengetahuan Sosial;
7. Seni dan budaya;
8. Pendidikan jasmani dan olah raga;
9. Keterampilan/kejuruan, dan
10. Muatan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang dimaksud produktif adalah mata pelajaran yang membekali peserta didik dengan kemampuan untuk bekerja yang sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di dunia kerja. Muatan Produktif merupakan muatan pokok/inti yang ada di SMK, karena sangat berperan untuk mendukung kemampuan peserta didik memasuki dunia kerja. Dengan demikian peserta didik banyak memperoleh beban belajar, sementara disisi lain dituntut juga untuk mempunyai kompetensi profesional yang mumpuni sesuai kebutuhan duni usaha/dunia industri. SKKNI juga diharapkan digunakan oleh dunia usaha/dunia industri sebagai acuan untuk rekrutmen dan seleksi, penempatan, penilaian kompetensi dan pengembangan karir lulusan SMK, baik di jalur struktural maupun fungsional. Digunakan untuk merumuskan pola pembagian kerja dan tata hubungan kerja antar posisi atau jabatan, terutama dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarkhi dan keterkaitan fungsi-fungsi produktif.

Dengan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perubahan proporsi dalam pendidikan kejuruan agar peserta didik memperoleh bekal kompetensi yang cukup untuk terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Pengertian